



Peran Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Remaja Di Desa Milangodaa Barat Bolaang Mongondow Selatan

Adrian Toi ¹⁾; Lisda Van Gobel ²⁾; Luthfia Bakari ³⁾

¹²³⁾Program Studi Administrasi Publik Fakultas Administrasi Dan Ilmu Sosial,
Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email: ¹⁾ adryantoi015@gmail.com ; ²⁾ lisdavangobel69@gmail.com ; ³⁾ bakariluthfia@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 Oktober 2024]
Revised [16 November 2024]
Accepted [01 Desember 2024]

KEYWORDS

Role, Government, And Youth
Empowerment.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah dalam program pemberdayaan remaja di Desa Milangodaa Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan sejumlah informan, serta dokumentasi. Hasil penelitian bahwa: dilihat dari peran pemerintah sebagai motivator masih belum maksimal dalam memotivasi dan melibatkan remaja dalam berbagai kegiatan di desa, hal ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi remaja. Kemudian peran pemerintah sebagai komunikator juga masih kurang efektif dikarenakan keterbatasan sumber informasi dan kurangnya sosialisasi program terkait rancangan desa. Dilihat dari peran pemerintah sebagai fasilitator masih kurang memadai dikarenakan fasilitas yang tersedia masih terbatas. Remaja berharap pemerintah desa segera menambah fasilitas yang dibutuhkan, seperti lapangan bulu tangkis dan sepak takraw. Disarankan, pemerintah perlu meningkatkan upaya dalam memotivasi dan melibatkan remaja dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa. Perlu meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi dengan lebih aktif menyampaikan program dan rencana desa. Perlu mempercepat realisasi penambahan lapangan bulu tangkis dan sepak takraw untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi dan bakat pada bidang olahraga tersebut.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Government in the youth empowerment program in Milangodaa Barat Village, Tomini District, South Bolaang Mongondow Regency. The research method uses a descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews with a number of informants, and documentation. The results of the study that: seen from the role of the government as a motivator is still not optimal in motivating and involving teenagers in various activities in the village, this shows the low level of youth participation. Then the role of the government as a communicator is also still less effective due to limited sources of information and lack of socialization of programs related to village design. Seen from the role of the government as a facilitator is still inadequate because the available facilities are still limited. Teenagers hope that the village government will immediately add the facilities needed, such as badminton and takraw courts. It is recommended that the government increase efforts to motivate and involve teenagers in the planning and implementation process of activities in the village. The need to increase transparency and openness of information by more actively conveying village programs and plans. The need to accelerate the realization of the addition of badminton and takraw courts to help teenagers develop their potential and talents in these sports.

PENDAHULUAN

Perjalanan suatu bangsa tidak terlepas dari kontribusi pemuda, yang selalu menjadi kekuatan pendorong dalam lahirnya peradaban baru. Sejarah dunia telah mencatat bahwa pemuda memainkan peran penting dalam berbagai fase perkembangan, termasuk dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era pasca-kemerdekaan, pemuda selalu berperan sebagai agen perubahan yang aktif. Mereka telah berkontribusi dalam momen-momen bersejarah, seperti kebangkitan nasional, revolusi, dan reformasi, yang semuanya menunjukkan betapa signifikan peran mereka dalam menentukan arah perjalanan bangsa. Karakteristik pemuda yang mencolok meliputi energi, dinamisme, kreativitas, dan inovasi. Mereka memiliki berbagai potensi luar biasa, seperti keberanian, kekuatan fisik, kemampuan berkomunikasi yang baik, serta jaringan yang luas. Selain itu, pemuda memiliki pemikiran yang idealis dan kreativitas tinggi, serta semangat pantang menyerah dan jiwa kepeloporan. Ciri-ciri ini menjadikan pemuda sebagai motor penggerak perubahan di masyarakat, di mana mereka selalu tampil di garis depan dalam menghadapi tantangan.

Pemberdayaan pemuda menjadi langkah krusial untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Setiap pemuda, baik yang masih pelajar, mahasiswa, atau yang telah menyelesaikan pendidikan, memiliki peran penting dalam mempertahankan kedaulatan dan mewujudkan aspirasi bangsa. Sebagai individu yang dinamis, pemuda berfungsi sebagai penghubung antara masa kini dan masa depan, memainkan peran

sentral dalam proses sosial, politik, dan pembangunan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, pemberdayaan generasi muda harus selaras dengan cita-cita nasional. Generasi muda diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam usaha-usaha yang mendukung nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, pemuda juga perlu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab kenegaraan untuk menjaga kelestarian ideologi bangsa. Namun, masa muda juga merupakan periode yang rentan terhadap pengaruh negatif, baik dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Berbagai masalah seperti pengangguran, pergaulan bebas, dan ketidakpercayaan diri dapat mengganggu perkembangan positif mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat kepada pemuda agar mereka dapat mengembangkan potensi dan berkontribusi secara konstruktif bagi masyarakat dan negara.

Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam undang-undang tersebut, pemuda diartikan sebagai warga negara Indonesia berusia antara 16 hingga 30 tahun, yang sedang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan penting. Pemuda memiliki potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kemampuan untuk mengaktualisasikan diri, serta cita-cita yang harus diberdayakan. Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui kegiatan yang dirancang secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi fisik, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan pribadi dan organisasi menuju kemandirian mereka.

Undang-undang ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan pemuda, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam berbagai bidang. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara, menghadapi tantangan tersendiri dalam hal ini. Pemerintah kabupaten dituntut untuk berperan aktif dalam pengembangan pemuda, karena mereka merupakan pilar penting dalam fungsi pemerintahan daerah. Namun, kenyataannya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdapat kecenderungan perilaku anarkis di kalangan pemuda. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh melemahnya perhatian pemerintah kabupaten terhadap pengembangan sektor kepemudaan. Adapun tujuan pemberdayaan pemuda adalah memberikan kesempatan lebih untuk meningkatkan sumber daya kepada generasi muda agar dapat berperan aktif dalam pembangunan negara, meningkatkan kesejahteraan, serta menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat.

Di Desa Milangodaa Barat Kecamatan Tomini merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memiliki pemuda berjumlah 134 orang yang perlu diberdayakan oleh pemerintah melalui program-program pemerintah agar pemuda lebih kreatif, inovatif, dan produktif. Berdasarkan hasil observasi ada beberapa hal yang masih kurang maksimal dilakukan oleh pemerintah desa, diantaranya : (1) masih kurangnya peran pemerintah sebagai motivator (memotivasi) dalam program pemberdayaan remaja. Pemerintah desa masih kurang menginspirasi dan memberikan dorongan kepada remaja untuk mendukung/melaksanakan program-program pemerintah. Contohnya program pemberdayaan dalam bidang olahraga dan seni, program ini bertujuan untuk melibatkan pemuda dalam kegiatan yang positif atau dapat mengembangkan potensi mereka. (2) Kurangnya peran pemerintah sebagai komunikator (mengkomunikasikan) dalam program pemberdayaan remaja. Pemerintah sebagai komunikator/mengkomunikasikan program sehingga pemuda dapat diberdayakan. Pemerintah juga bertugas menyampaikan informasi yang penting dan relevan kepada remaja, serta mendengarkan dan memahami aspirasi dan kebutuhan mereka. Contohnya memberikan pelatihan kewirausahaan kepada pemuda. Program ini bertujuan membangun sikap dan mentalitas kewirausahaan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam dunia bisnis. Dengan mempersiapkan pemuda menjadi wirausaha, program ini juga dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. (3) Kurangnya peran pemerintah sebagai fasilitator (memfasilitasi) dalam program pemberdayaan remaja. Dengan menyediakan fasilitas serta memberikan kesempatan kepada remaja untuk berkembang, baik melalui penyediaan infrastruktur, program, maupun dukungan finansial. Contohnya dengan menyediakan lapangan olahraga bagi pemuda yang memiliki bakat pada bidang tertentu, serta memberikan bantuan modal usaha bagi remaja yang ingin memulai usaha kecil. Hal ini bertujuan agar pemuda dapat mengasah potensi mereka baik di bidang olahraga maupun kewirausahaan.

LANDASAN TEORI

Teori

Pemberdayaan remaja merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan program-program yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan remaja. Untuk memahami peran tersebut, beberapa teori dan konsep dapat dijadikan sebagai landasan.



Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan (empowerment) mengacu pada proses dimana individu atau kelompok memperoleh kontrol atas sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Rappaport (1987), pemberdayaan dapat memperkuat kapasitas individu dan komunitas untuk memecahkan masalah dan mengambil inisiatif dalam pengembangan diri. Dalam konteks remaja, pemerintah dapat menyusun program yang memberikan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempromosikan keberdayaan (Cheng, 2019).

Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan remaja. Menurut Santosa (2021), pemerintah harus berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan program yang spesifik untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi mereka. Ini meliputi penyediaan fasilitas pendidikan, akses kesehatan, serta dukungan psikososial yang dibutuhkan remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Program Pemberdayaan

Program pemberdayaan remaja dapat berbentuk berbagai kegiatan, seperti pendidikan formal dan non-formal, pelatihan keterampilan, serta kegiatan yang mendorong partisipasi aktif di masyarakat. Menurut Ardianto (2022), keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini memungkinkan terciptanya program yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan remaja setempat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan remaja. Keterlibatan masyarakat, dukungan dari orang tua, dan kesesuaian program dengan budaya lokal menjadi elemen penting yang harus diperhatikan (Hidayati, 2020). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang holistik dan berbasis pada kebutuhan nyata remaja di lapangan.

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam program pemberdayaan remaja di Desa Milangodaa Barat, Bolaang Mongondow Selatan, sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang produktif dan berdaya saing. Kebijakan dan program yang berbasis pada prinsip pemberdayaan, kolaborasi antarsektor, serta keterlibatan masyarakat akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Milangodaa Barat, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, karena belum ada studi yang mengkaji peran pemerintah dalam pemberdayaan pemuda di wilayah tersebut, dan penulis yang tinggal di desa ini memiliki akses yang mudah untuk mengumpulkan data. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mengungkap fakta terkait fenomena yang diteliti. Fokus penelitian meliputi peran pemerintah sebagai motivator, komunikator, dan fasilitator dalam pemberdayaan remaja. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan utama dan pendukung, serta dokumentasi dan observasi. Setelah pengumpulan, data dianalisis secara kualitatif melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk mencapai kesimpulan yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator sudah cukup baik tetapi belum sempurna. Meskipun pemerintah telah menyediakan lapangan sepak bola dan bola voli, fasilitas tersebut masih terbilang kurang karena ada remaja yang mempunyai bakat pada bidang olahraga lain seperti sepak takraw dan bulu tangkis. Remaja Desa Milangodaa berharap agar penambahan dua lapangan tersebut dapat segera direalisasikan.

Berdasarkan beberapa pernyataan atau hasil wawancara dengan informan dan dari pengamatan penulis, menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Remaja di Desa Milangodaa Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dilihat dari aspek fasilitator masih kurang memadai. Dikarenakan Remaja Desa Milangodaa Barat masih terbatas dalam mengembangkan potensi mereka Karen saat ini hanya tersedia lapangan sepak bola bola voli. Namun,

ada beberapa remaja yang memiliki bakat pada bidang bulu tangkis dan sepak takraw namun fasilitas olahraga tersebut belum tersedia.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, remaja mempunyai peran yang sangat strategis, maka perlu dilakukan pengembangan potensi diri setiap anak-anak muda. Dalam hal ini, Pemerintah bertugas, dan mempunyai fungsi, wewenang serta tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pelayanan kepemudaan. Sebagaimana amanah Undang-undang No.40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, yang mengatur dan menata pembangunan nasional kepemudaan. Pada pasal 13, menyebutkan: Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Gambar 1 Wawancara Bersama Narasumber



Sumber : Dokumentasi Penelitian

Berikut ini adalah tahap pembahasan dari proses penelitian terkait dengan Peran Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Remaja di Desa Milangodaa Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diatas mengenai Peran Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Remaja di Desa Milangodaa Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang dilihat dari aspek Motivator, Komunikator, dan Fasilitator yang belum efektif.

Pertama, Peran Pemerintah Sebagai Motivator yaitu memotivasi, mendorong, mengarahkan, dan memberi dukungan kepada remaja untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Sebagai Motivator masih belum maksimal dalam memotivasi dan melibatkan remaja dalam berbagai kegiatan di desa. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi remaja dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa seperti kegiatan olahraga, keagamaan maupun perayaan ulang tahun desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih aktif dalam berperan sebagai motivator, agar dapat meningkatkan keterlibatan remaja dan memaksimalkan potensi mereka dalam mendukung kemajuan desa.

Kedua, Peran Pemerintah Sebagai Komunikator yaitu menjalin komunikasi yang efektif antara pemerintah dan remaja. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi, dan program-program secara jelas, dan transparan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Sebagai Komunikator masih belum efektif. Keterbatasan sumber informasi dan kurangnya sosialisasi program serta rancangan desa kepada remaja menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi remaja dalam kegiatan desa. Pemerintah Desa juga belum maksimal dalam mendengarkan dan memahami kebutuhan remaja, yang menyebabkan minimnya komunikasi antara remaja dan pemerintah desa. Akibatnya, banyak remaja yang tidak mengetahui program-program penting seperti pengembangan UMKM, sehingga mereka kurang terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam cara pemerintah desa menyampaikan informasi dan melibatkan remaja dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program desa.

Ketiga, Peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu menyediakan sarana dan prasarana dan dukungan yang diperlukan untuk memudahkan remaja dalam menggali dan mengembangkan potensi mereka.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah sebagai fasilitator sudah baik, namun belum maksimal dalam mendukung pengembangan potensi remaja. Meskipun pemerintah telah menyediakan lapangan sepakbola dan bola voli, fasilitas yang tersedia masih terbatas dan belum memadai untuk mengakomodasi berbagai minat dan bakat remaja dalam olahraga lain, seperti bulu tangkis dan sepak takraw. Keterbatasan fasilitas ini menghambat remaja dalam mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Oleh karena itu, remaja berharap pemerintah desa dapat segera menambah fasilitas yang dibutuhkan agar semua potensi remaja dapat terfasilitasi dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari aspek motivator masih kurang maksimal dalam memotivasi dan melibatkan remaja dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilihat dari rendahnya partisipasi remaja dalam berbagai kegiatan di desa.
2. Dilihat dari aspek komunikator masih belum efektif. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi program desa kepada remaja menyebabkan minimnya partisipasi mereka dalam kegiatan di desa.
3. Dilihat dari aspek fasilitator sudah baik namun belum maksimal. Meskipun telah disediakan lapangan sepak bola dan bola voli, fasilitas yang tersedia masih kurang memadai untuk mengembangkan berbagai potensi remaja yang ada, terutama bagi mereka yang memiliki bakat di bidang lain seperti bulu tangkis dan sepak takraw.

Secara keseluruhan Peran Pemerintah Dalam Program Pemberdayaan Remaja di Desa Milangodaa Barat Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masih kurang efektif jika dilihat dari aspek motivator, komunikator, dan fasilitator.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka berikut saran yang penulis tawarkan yang bisa dijadikan bahan pertimbangan:

1. Diharapkan pemerintah desa perlu meningkatkan upaya dalam memotivasi remaja dengan pendekatan yang lebih efektif, seperti mengadakan program-program yang sesuai dengan minat dan kebutuhan remaja, serta melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Diharapkan pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi dengan lebih aktif menyampaikan program dan rencana desa kepada remaja melalui musyawarah atau ruang terbuka lainnya. Selain itu, penting bagi pemerintah desa untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan remaja agar dapat mengakomodasi minat mereka dalam kegiatan yang direncanakan.
3. Diharapkan pemerintah desa perlu mempercepat realisasi pembangunan lapangan bulu tangkis dan sepak takraw. Hal ini akan membantu remaja desa milangodaa barat dalam mengembangkan potensi dan bakat mereka di bidang olahraga tersebut.
4. Diharapkan pemerintah perlu meningkatkan perannya sebagai motivator, komunikator dan fasilitator dalam program pemberdayaan remaja dengan cara memperkuat komunikasi, menyediakan fasilitas yang memadai, serta mendorong partisipasi aktif remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, R. (2022). *Program Pemberdayaan Generasi Muda di Indonesia: Pendekatan dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Lembaga Penelitian.
- Cheng, M. (2019). *Empowerment in Youth Development: Theory and Practice*. London: Routledge.
- Hidayati, U. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Remaja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardikanto, M. (2018). *Kepemudaan dan Perubahan Sosial: Ekspresi dan Peran Pemuda di Era Modern*. Semarang: Graha Ilmu.
- Prastowo, J. (2021). "Strategi Pemberdayaan Pemuda dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Sosial*, 34(1), 45-60.

- Rappaport, J. (1987). "Terms of Empowerment/Exemplars of Prevention: Toward a Theory for Community Psychology." *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121-148.
- Santosa, S. (2021). *Peran Pemerintah dalam Pengembangan Potensi Pemuda*. Surabaya: Penerbit Universitas Surabaya.
- Sudarmanto, A. & Tanjung, R. (2020). "Youth Empowerment as a Strategy for Sustainable Development in Indonesia." *International Journal of Youth Studies*, 5(3), 221-234.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Widiastuti, R. (2021). *Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Alfabeta.